



NEWSLETTER PUSDATIN

EDISI APRIL 2019



EKSPOR KOMODITAS HORTIKULTURA MENJANJIKAN

Selain memperluas tujuan negara ekspor, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga terus menggenjot ekspor produk pertanian di luar subsektor perkebunan. Hal ini dilakukan mengingat sampai saat ini hampir 97% ekspor produk pertanian Indonesia berasal dari komoditas perkebunan.

Komoditas hortikultura mempunyai potensi ekspor yang menjanjikan untuk digarap lebih serius lagi ke depan. Terbukti dalam empat tahun terakhir, ekspor beberapa komoditas hortikultura menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berpotensi sebagai ekspor andalan ke depan, seperti mangga, manggis, nenas, dan pisang.

Dalam periode 2013-2018, ekspor produk mangga (baik segar dan olahan) menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, 135,7% atau rata-rata tumbuh 77,21% per tahun. Pada tahun 2013, ekspor produk mangga Indonesia sekitar 1.089 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2.568 ton. Kinerja yang luar biasa juga ditunjukkan oleh ekspor produk manggis, yaitu meningkat 407,73% atau meningkat rata-rata 110,37% per tahun. Pada tahun 2013, ekspor manggis hanya 7.648 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 38.831 ton.

Kinerja ekspor produk nenas dan pisang juga sangat baik. Selama periode 2013-2018, ekspor nenas meningkat 31,27% atau rata-rata 8,65% per tahun dan ekspor produk pisang meningkat

434,70% atau rata-rata 79,05% per tahun. Pada tahun 2013, ekspor produk nenas dan pisang masing-masing 174.096 ton dan 5.680 ton, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 228.537 ton dan 30.373 ton.

Pada kelompok komoditas sayur, kinerja ekspor bawang merah sangat baik. Selama 2013-2018, ekspor produk bawang merah meningkat 25,81%. Pada tahun 2013 jumlah ekspor bawang merah sebesar 4.982 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.268 ton. Dampak dari keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi bawang merah dalam negeri, sejak tahun 2017 Indonesia tidak lagi mengimpor bawang merah segar sehingga membawa Indonesia surplus dalam perdagangan bawang merah masing-masing 7.429 ton pada tahun 2017 dan 6.040 ton pada tahun 2018. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi cabai menyebabkan Indonesia juga sejak tahun 2016 tidak lagi mengimpor cabai segar. Selama 2016-2018 Indonesia surplus dalam perdagangan cabai segar berkisar 298 ton per tahun.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, pada saat sekarang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga sedang menggenjot produksi bawang putih dalam negeri. Peningkatan produksi komoditas ini dilakukan dengan pengembangan kawasan bawah putih dan mendorong petani untuk meningkatkan luas pertanaman bawang putih melalui bantuan benih, serta menjalankan kebijakan yang mewajibkan setiap importir untuk menanam seluas 5% dari yang bawang putih yang dimpor.

(Dr. Ir. I ketut karyasa, M.Si)

DAFTAR ISI

- 1 Ekspor Komoditas Hortikultura Menjanjikan
- 2 Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah
- 8 Kondisi Ekonomi Sosial Petani Semakin Membaik
- 9 Rancangan Sistem SSO Di Kementerian Pertanian



PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI DAN HARGA PRODUSEN GABAH

A. Perkembangan Nilai Tukar Petani

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada Maret 2019, NTP secara nasional turun 0,21 persen dibandingkan NTP Februari 2019, yaitu dari 102,94 menjadi 102,73. Penurunan NTP pada Maret 2019 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

Penurunan NTP Maret 2019 dipengaruhi oleh penurunan NTP di tiga subsektor pertanian, yaitu NTP Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,33 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,22 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,41 persen. Sebaliknya, dua subsektor lainnya mengalami kenaikan NTP, yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 0,87 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,70 persen.

2. Indeks Harga Yang Diterima Oleh Petani (It)

Pada Maret 2019, secara nasional It naik sebesar 0,02 persen dibanding It Februari 2019, yaitu dari 138,21 menjadi 138,23. Kenaikan It pada Maret 2019 disebabkan kenaikan It di dua subsektor pertanian, yaitu Subsektor Hortikultura sebesar 1,13 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,94 persen. Sementara itu, tiga subsektor lainnya yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan mengalami penurunan It masing-masing sebesar 1,04 persen, 0,14 persen, dan 0,25 persen.

3. Indeks Harga yang Dibayar Oleh Petani (Ib)

Melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Maret 2019, secara nasional Ib naik sebesar 0,23 persen bila dibanding Ib Februari 2019, yaitu dari 134,26 menjadi 134,56. Hal ini

disebabkan oleh kenaikan nilai lb di seluruh subsektor pertanian, yaitu: Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,29 persen, Subsektor Hortikultura sebesar 0,26 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,24 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,08 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,16 persen.

4. NTP Menurut Subsektor

a. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)

Pada Maret 2019 terjadi penurunan NTPP sebesar 1,33 persen. Hal ini terjadi karena It turun sebesar 1,04 persen, sedangkan lb naik sebesar 0,29 persen.

Penurunan It pada Maret 2019 disebabkan oleh penurunan indeks pada kelompok padi dan palawija (khususnya komoditas gabah dan jagung) masing-masing sebesar 1,24 persen dan 0,45 persen.

Kenaikan lb sebesar 0,29 persen disebabkan oleh kenaikan Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,36 persen, dan Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen.

b. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)

Pada Maret 2019, NTPH naik sebesar 0,87 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It sebesar 1,13 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan lb sebesar 0,26 persen.

Kenaikan It Maret 2019 disebabkan naiknya harga berbagai komoditas di seluruh kelompok Subsektor Hortikultura. Indeks pada kelompok sayur-sayuran (khususnya bawang merah dan bawang daun) naik sebesar 1,70 persen, kelompok buah-buahan (khususnya komoditas salak dan pisang) naik sebesar 0,64 persen, dan indeks kelompok tanaman obat (khususnya komoditas jahe dan lengkuas) naik sebesar 0,85 persen.

Kenaikan lb sebesar 0,26 persen, yaitu dari

135,32 menjadi 135,68, disebabkan naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,33 persen sedangkan indeks kelompok BPPBM naik 0,12 persen.

c. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Pada Maret 2019, terjadi kenaikan NTPR sebesar 0,70 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,94 persen lebih tinggi dari kenaikan lb sebesar 0,24 persen.

Kenaikan It Maret 2019 disebabkan naiknya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas kelapa sawit dan kelapa. Kenaikan yang terjadi pada lb disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,28 persen dan indeks kelompok BPPBM sebesar 0,16 persen.

d. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Pada Maret 2019, NTPT turun sebesar 0,22 persen. Hal ini terjadi karena It mengalami penurunan sebesar 0,14 persen, sedangkan lb naik sebesar 0,08 persen.

Penurunan It Maret 2019 disebabkan oleh turunnya It pada tiga kelompok penyusun Subsektor Peternakan, yaitu kelompok ternak besar sebesar 0,04, kelompok unggas sebesar 0,82 dan kelompok hasil ternak sebesar 0,21. Sedangkan It kelompok ternak kecil mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen. Komoditas yang menyebabkan penurunan It terbesar pada Subsektor Peternakan yaitu ayam ras pedaging dan telur ayam ras.

Kenaikan yang terjadi pada lb sebesar 0,08 persen dikarenakan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,37 persen, sedangkan indeks kelompok BPPBM turun sebesar 0,17 persen.

e. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Pada Maret 2019, NTNP turun sebesar 0,41

persen. Hal ini terjadi karena It turun sebesar 0,25 persen, sedangkan Ib naik sebesar 0,16 persen. Penurunan Itu dikarenakan turunnya harga berbagai komoditas pada kegiatan perikanan tangkap. It kegiatan perikanan tangkap (khususnya komoditas udang dan ikan kembung) secara rata-rata turun sebesar 0,64 persen, sedangkan kegiatan perikanan budidaya (khususnya komoditas ikan nila dan rumput laut) secara rata-rata naik sebesar 0,04 persen.

Kenaikan yang terjadi pada Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,17 persen dan kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,16 persen.

1) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada Maret 2019, NTN turun sebesar 0,70 persen. Hal ini terjadi karena penurunan It sebesar 0,64 persen, sedangkan Ib mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen. Penurunan It disebabkan oleh turunnya It di kelompok penangkapan perairan umum (khususnya komoditas ikan gabus dan ikan papuyu) sebesar 0,20 persen dan kelompok penangkapan laut (khususnya komoditas udang dan ikan kembung) sebesar 0,64 persen. Ib mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen dikarenakan naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,06 persen dan indeks kelompok BPPBM naik sebesar 0,12 persen.

2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pada Maret 2019, NTPi turun sebesar 0,18 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,04 persen, lebih kecil dari kenaikan Ib sebesar 0,22 persen. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya harga sebagian jenis komoditas, khususnya ikan nila dan rumput laut. Sedangkan kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,26 persen dan kenaikan indeks kelompok BPPBM sebesar 0,18 persen.

5. NTP Provinsi

Dari 33 provinsi sebanyak 16 provinsi mengalami

penurunan NTP, sedangkan 17 provinsi lainnya mengalami kenaikan NTP. Penurunan NTP terbesar pada Maret 2019 terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 2,43 persen, sebaliknya kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 1,41 persen.

Penurunan terbesar NTP di DKI Jakarta disebabkan penurunan pada Subsektor Perikanan kegiatan perikanan tangkap khususnya pada komoditas cumi-cumi yang turun sebesar 2,62 persen. Sedangkan kenaikan tertinggi NTP di Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan kenaikan pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat khususnya komoditas kakao yang naik sebesar 3,11 persen.

6. Inflasi Perdesaan

Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen Nilai yang Dibayar oleh Petani. Inflasi perdesaan diperoleh dari perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Petani. Secara nasional, pada Maret 2019 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,33 persen, dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Dari 33 provinsi yang dihitung IKRT-nya pada Maret 2019, 19 provinsi mengalami inflasi, 13 provinsi mengalami deflasi dan 1 provinsi relatif stabil. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,98 persen dan deflasi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 0,68 persen, sementara itu Provinsi Kalimantan Barat relatif stabil.

7. NTUP Menurut Subsektor

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat Indeks Harga yang Diterima oleh Petani dibandingkan dengan Indeks Harga

Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Pada Maret 2019 terjadi penurunan NTUP sebesar 0,04 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It sebesar 0,02 persen lebih rendah dari kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,06 persen. Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya NTUP pada dua subsektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Perikanan.

Tabel 1
Jumlah Observasi, Harga Gabah di Tingkat Petani dan Penggilingan, dan HPP Menurut Kelompok Kualitas, Maret 2019

Subsektor	Februari 2019	Maret 2019	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	112,51	111,23	-1,14
2. Hortikultura	109,86	110,97	1,01
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	104,17	104,98	0,78
4. Peternakan	116,11	116,15	0,04
5. Perikanan	119,79	119,30	-0,41
a. Tangkap	127,30	126,33	-0,76
b. Budidaya	114,41	114,24	-0,14
Nasional	111,18	111,14	-0,04

Subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan terbesar NTUP pada Maret 2019 yaitu sebesar 1,14 persen, sedangkan Subsektor Hortikultura merupakan subsektor yang mengalami kenaikan NTUP tertinggi yaitu sebesar 1,01 persen.

B. Perkembangan Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

1. Harga Produsen Gabah

Survei monitoring harga produsen gabah selama Maret 2019 dilakukan terhadap 2.135 observasi transaksi penjualan gabah di 28 provinsi terpilih. Observasi harga terutama berasal dari lima provinsi di Jawa sebanyak 895 observasi (41,92 persen), diikuti sembilan provinsi di Sumatera 555 observasi (26,00 persen), empat provinsi di Sulawesi 330 observasi (15,46 persen), empat provinsi di Kalimantan 153 observasi (7,17 persen), dua provinsi di Nusa Tenggara 116 observasi (5,43 persen), provinsi Bali 75 observasi (3,51 persen), dua provinsi di Maluku 8 observasi (0,37 persen), dan provinsi Papua 3 observasi (0,14 persen). Berdasarkan komposisinya, jumlah observasi harga gabah masih didominasi transaksi penjualan GKP

sebanyak 1.474 observasi (69,04 persen), diikuti oleh gabah kualitas rendah sebanyak 469 observasi (21,97 persen), dan GKG sebanyak 192 observasi (8,99 persen). Dari jumlah observasi tersebut, terdapat kasus harga di bawah HPP baik di tingkat Petani sebanyak 18 kasus (1,22 persen) dan di tingkat penggilingan sebanyak 6 kasus (0,36 persen).

Tabel 2
Jumlah Observasi, Harga Gabah di Tingkat Petani dan Penggilingan, dan HPP Menurut Kelompok Kualitas, Maret 2019

Kelompok Kualitas	Jumlah Observasi	Harga di Petani (Rp/kg)		Rata-Rata Harga (Rp/kg)		HPP (Rp/kg)	
		Terendah	Tertinggi	Petani	Penggilingan	Petani	Penggilingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
GKP	1 474 (69,04%)	3 200 (NTB)	6 667 (Sumbar)	4 604	4 706	3 700	3 750
GKG	192 (8,99%)	4 500 (Kalim)	6 679 (Kalsel)	5 530	5 654	---	4 600
Kualitas Rendah	469 (21,97%)	3 300 (NTB)	5 714 (Sumbar)	4 296	4 393	---	---
Total	2 135 (100,00%)						

Keterangan :

- GKG : KA ≤ 14,00% dan KH ≤ 3,00%
- GKP : KA (14,01%–25,00%) dan KH (3,01%–10,00%)
- Kualitas Rendah: KA > 25,00% atau KH > 10,00%
- Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015 tgl.17 Maret 2015

Selama Maret 2019, harga tertinggi di tingkat petani Rp6.679,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp7.000,00 per kg. Sementara harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan masing-masing Rp3.200,00 per kg dan Rp3.325,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani berasal dari GKG varietas Unus Kuning & Karang Dukuh yang terjadi di Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar (Kalimantan Selatan), dan tingkat penggilingan berasal dari GKP varietas IR yang terjadi di Kec. Skanto, Kab. Keerom (Papua). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan penggilingan berasal dari GKP varietas Inpari 46 & Ciliwung yang terjadi di Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat).

Dibandingkan bulan lalu, rata-rata harga GKP di tingkat petani selama Maret 2019 turun sebesar Rp510,00 per kg (9,98 persen) menjadi

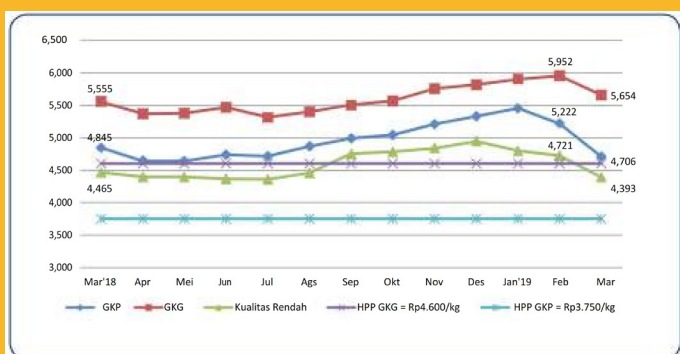
Rp4.604,00 per kg, GKG di tingkat petani turun sebesar Rp298,00 per kg (5,11 persen) menjadi Rp5.530,00 per kg, dan rata-rata harga gabah kualitas rendah juga turun sebesar Rp320,00 per kg (6,93 persen) menjadi Rp4.296,00 per kg.

Tabel 3
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air Serta Perkembangannya, Maret 2018-Maret 2019

Tahun/Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2018									
Mar	19,50	4 757	-8,65	12,93	5 442	-8,71	26,07	4 367	-8,16
Apr	19,11	4 556	-4,22	12,93	5 242	-3,66	25,29	4 309	-1,34
Mei	18,56	4 554	-0,04	13,03	5 267	0,47	23,81	4 305	-0,09
Jun	18,37	4 650	2,10	12,84	5 361	1,78	23,73	4 281	-0,55
Jul	18,72	4 633	-0,38	12,91	5 206	-2,88	25,10	4 259	-0,53
Agst	18,77	4 774	3,05	13,04	5 308	1,95	25,57	4 363	2,45
Sep	18,85	4 889	2,40	12,68	5 399	1,71	25,06	4 652	6,61
Okt	19,27	4 937	0,98	12,60	5 467	1,26	25,28	4 694	0,92
Nov	18,92	5 116	3,64	12,63	5 646	3,28	25,96	4 739	0,95
Des	18,44	5 237	2,35	12,81	5 714	1,19	24,48	4 837	2,08
2019									
Jan	18,24	5 353	2,22	12,76	5 780	1,16	25,95	4 693	-2,99
Feb	18,35	5 114	-4,46	12,92	5 828	0,83	26,69	4 616	-1,63
Mar	19,82	4 604	-9,98	12,81	5 530	-5,11	25,70	4 296	-6,93
Perubahan (%) Mar'19 thd Mar'18			-3,22			1,62			-1,63

Dibandingkan Maret 2018, rata-rata harga di tingkat petani pada Maret 2019 untuk GKP mengalami penurunan sebesar 3,22 persen atau Rp153,00 per kg, GKG naik sebesar 1,62 persen atau Rp88,00 per kg, dan gabah kualitas rendah turun sebesar 1,63 persen atau Rp71,00 per kg.

Gambar 1
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut kelompok Kualitas Maret 2018-Maret 2019



Dibandingkan bulan lalu, rata-rata harga GKP di tingkat penggilingan selama Maret 2019 turun Rp516,00 per kg (9,87 persen) menjadi Rp4.706,00 per kg, GKG turun Rp298,00 per kg (5,01 persen) menjadi Rp5.654,00 per kg,

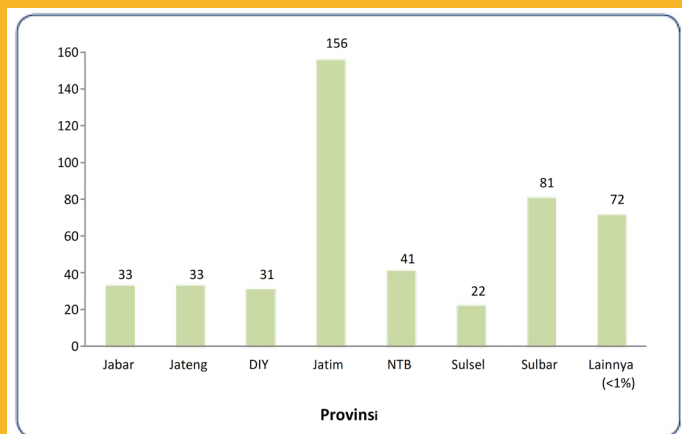
dan gabah kualitas rendah turun Rp328,00 per kg (6,95 persen) menjadi Rp4.393,00 per kg. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018, rata-rata harga di tingkat penggilingan pada Maret 2019 untuk GKP mengalami penurunan 2,87 persen yaitu sebesar Rp139,00 per kg, kualitas GKG naik 1,78 persen sebesar Rp99,00 per kg, dan gabah kualitas rendah turun 1,61 persen yaitu sebesar Rp72,00 per kg.

Selama periode Maret 2018–Maret 2019, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP sebesar Rp5.353,00 per kg pada Januari 2019, GKG sebesar Rp5.828,00 per kg di Februari 2019, dan kualitas rendah sebesar Rp4.837,00 terjadi pada Desember 2018. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP Rp4.554,00 terjadi pada Mei 2018, sedangkan GKG dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp5.206,00 dan Rp4.259,00 per kg terjadi pada Juli 2018.

Begitu pula di tingkat penggilingan, rata-rata harga tertinggi di tingkat penggilingan untuk GKP Rp5.453,00 per kg terjadi pada Januari 2019, GKG Rp5.952,00 per kg terjadi pada Februari 2019, dan gabah kualitas rendah Rp4.948,00 terjadi pada Desember 2018. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP Rp4.642,00 terjadi pada Mei 2018, sedangkan GKG dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp5.313,00 dan Rp4.361,00 per kg terjadi pada Juli 2018.

Dari 469 observasi pada transaksi penjualan gabah kualitas rendah atau 21,97 persen dari keseluruhan transaksi penjualan gabah selama bulan Maret 2019, berasal dari Provinsi Jawa Timur 7,31 persen, Sulawesi Barat 3,79 persen, Nusa Tenggara Barat 1,92 persen, Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing 1,55 persen, D.I Yogyakarta 1,45 persen, dan Sulawesi Selatan 1,03 persen. Sementara itu, gabah kualitas rendah dari provinsi lainnya masing-masing di bawah 1,00 persen.

Gambar 2
Transaksi Penjualan Gabah Kualitas Rendah Maret 2019 (Observasi)



2. HARGA PRODUSEN BERAS DI PENGGILINGAN

Pada Maret 2019, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.815,00 per kg, turun sebesar 1,93 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.555,00 per kg, turun sebesar 2,49 persen. Rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp9.271,00 per kg, turun sebesar 2,15 persen.

Dibandingkan dengan Maret 2018, rata-rata harga beras di penggilingan pada Maret 2019 untuk semua kualitas yaitu premium, medium, dan rendah mengalami penurunan masing-masing 0,79 persen, 1,47 persen, dan 2,96 persen.

Selama periode Maret 2018–Maret 2019, rata-rata harga beras tertinggi di penggilingan untuk kualitas premium dan medium masing-masing Rp10.111,00 per kg dan Rp9.903,00 per kg terjadi pada Januari 2019, sedangkan kualitas rendah Rp9.554,00 terjadi pada Maret 2018. Sebaliknya, rata-rata harga beras terendah di penggilingan untuk kualitas premium Rp9.458,00 terjadi pada Agustus 2018, sedangkan kualitas medium dan rendah masing-masing Rp9.135,00 per kg, dan Rp8.941,00 per kg terjadi pada Juni 2018.

Tabel 4
Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras (Broken), Maret 2018-2019

Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2018*									
Mar	9 893	-4,71	9,35	9 698	-5,06	20,04	9 554	-4,34	33,18
Apr	9 525	-3,72	9,31	9 221	-4,92	19,92	8 991	-5,89	33,36
Mei	9 524	-0,01	9,84	9 190	-0,33	19,80	9 002	0,11	32,10
Jun	9 478	-0,48	9,87	9 135	-0,60	19,76	8 941	-0,67	33,53
Jul	9 520	0,44	9,84	9 198	0,68	19,87	9 015	0,82	33,69
Agt	9 458	-0,65	9,97	9 172	-0,28	19,85	8 977	-0,42	33,59
Sep	9 572	1,20	10,04	9 310	1,50	19,60	9 125	1,65	33,16
Okt	9 645	0,77	9,82	9 395	0,92	19,76	9 194	0,75	33,21
Nov	9 771	1,30	9,81	9 604	2,22	20,13	9 426	2,52	31,89
Des	9 818	0,48	9,87	9 798	2,03	19,66	9 432	0,07	32,07
2019									
Jan	10 111	2,98	10,07	9 903	1,06	19,81	9 536	1,10	32,20
Feb	10 008	-1,02	10,20	9 800	-1,04	20,17	9 474	-0,65	32,99
Mar	9 815	-1,93	9,93	9 555	-2,49	19,99	9 271	-2,15	33,94
Perubahan (%) Mar'19 thd Mar'18		-0,79			-1,47			-2,96	

Keterangan :

* Permentan No.31 Tahun 2017 :

- Premium : Maksimum beras patah (broken) s.d 15%
- Medium : Beras patah (broken) 15,01-25,00%
- Rendah : Beras patah (broken) di atas 15,00%

(Dhanang Susatyo, SE)

**KONDISI SOSIAL EKONOMI
 PETANI
 SEMAKIN MEMBAIK**

Keberhasilan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan pertanian dalam empat tahun terakhir (2014-2018) di perdesaan yang mayoritas adalah petani terlihat dari semakin membaiknya kondisi ekonomi petani. Beberapa indikator yang representasi untuk menunjukkan kondisi tersebut, seperti meningkatnya daya beli atau kesejahteraan masyarakat, menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, stabilnya atau inflasi bahan makanan/pangan, dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Membaiknya daya beli atau kesejahteraan petani terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam empat tahun terakhir. Menurut data yang dirilis BPS (tahun dasar 2012=100), selama periode 2014-2018, NTP terus meningkat dari 102,03 (2014) meningkat menjadi 102,46

(2018). Demikian halnya dengan NTUP, juga terus meningkat dan bahkan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari NTP. Pada 2014 besarnya NTUP adalah 106,05 dan tahun 2018 meningkat menjadi 111,83.

Membatkannya daya beli masyarakat, ternyata juga diikuti oleh semakin meratanya atau menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini ditandai oleh menurunnya Gini Ratio. Pada Maret 2013, secara nasional Gini ratio masih 0,424 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389. Pada September 2018 pemerataan pendapatan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya Gini Ratio menjadi 0,384. Sejalan pada tingkat nasional, ketimpangan pendapatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan juga menurun. Namun demikian, yang cukup membanggakan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan, yang ditandai Gini Ratio di perdesaan selalu lebih rendah dari perkotaan. Pada Maret 2013, Gini Ratio di perkotaan 0,431 dan di perdesaan 0,320 dan pada Maret 2018 turun masing-masing menjadi 0,401 di perkotaan dan 0,324 di perdesaan. Pada September 2018, kembali turun masing-masing menjadi 0,391 di perkotaan dan 0,319 di perdesaan.

Selain mampu memperbaiki daya beli dan ketimpangan pendapatan masyarakat, keberhasilan pemerintah dalam memacu produksi dalam negeri berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam empat tahun terakhir inflasi bahan makanan/pangan menurun secara konsisten. Pada tahun 2013, inflasi bahan makanan/pangan masih sangat tinggi, 11,35% dan pada tahun 2014 turun menjadi 10,57% Pada tahun 2015 dan 2016 , inflasi bahan makanan/pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93% dan 5,69%. Bahkan pada tahun 2017 inflasi bahan makanan/pangan turun sampai

tingkat 1,26% dan merupakan inflasi bahan makanan/pangan yang terendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Dampak dari membaiknya ketiga indikator di atas (membaiknya daya beli, menurunnya ketimpangan pendapatan, dan stabilnya harga pangan) menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun. Pada Maret 2018, secara nasional jumlah penduduk miskin turun dan menembus angka satu digit (9,82%), dan pada September 2018 kembali turun menjadi 9,66%. Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan, pada Maret 2013 masih tercatat 14,32%, dan Maret 2018 turun menjadi 13,20% dan pada September 2018 kembali turun menjadi 13,10%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga terus menurun, dari 8,39% pada Maret 2013, menjadi 7,02% Maret 2018 dan tinggal 6,89% pada September 2018.

Membatkannya indikator-indikator ekonomi utama di atas menunjukkan bahwa program dan kebijakan terobosan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian selama ini sudah tepat karena terbukti mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan secara nyata, tidak hanya sebatas peningkatan produksi.

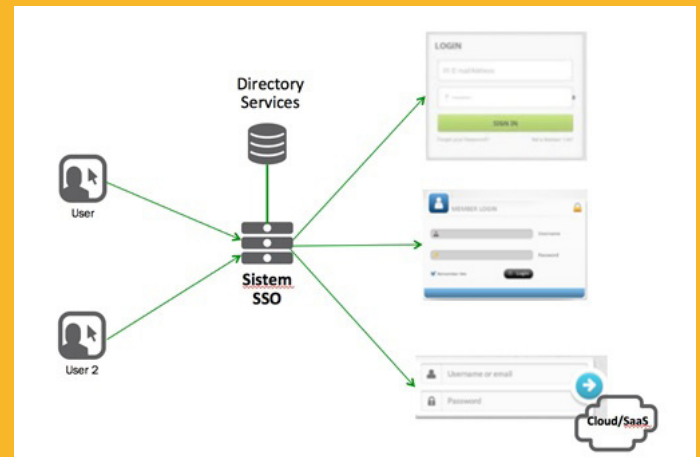
(Dr. Ir. I ketut kariyasa, M.Si)



RANCANGAN SISTEM SSO DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Sistem SSO adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu dalam simplifikasi dan pemanunggalan login, baik yang terkait dengan sistem aplikasi maupun akses jaringan dan internet. Setiap fungsi dalam organisasi umumnya membutuhkan aplikasi yang berbeda. Dilain sisi setiap aplikasi yang dinamis memerlukan fungsi login sebagai alat identifikasi dan otorisasi akses user. Sistem SSO dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cara melakukan penyederhanaan login (single point of login) yang diperkuat dengan berbagai cek keamanan dan otorisasi kontrol user.

directory account e-mail Kementerian Pertanian.



Gambar 2. Single Sign On System

Melalui active directory services, user dapat login menggunakan account e-mail yang kemudian akan di autentikasi oleh sistem SSO untuk dapat masuk ke setiap aplikasi yang ada.

Saat ini telah dikembangkan rancangan prototype SSO dengan alat ujicoba dan beberapa list aplikasi yang telah terdaftar, seperti:

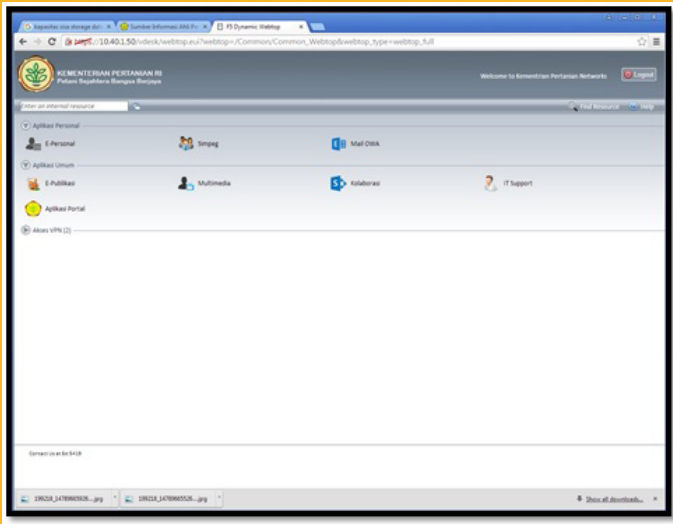
1. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
2. E-Mail Kementerian Pertanian (@pertanian.go.id)
3. Aplikasi Berbagi Dokumen dan Pengetahuan (ABDP-Sharepoint)
4. Portal Multimedia
5. IT Support
6. E-Personal
7. Aplikasi Portal
8. Dan beberapa aplikasi untuk administrator jaringan



Gambar 1. Sistem Autentifikasi User Tradisional

Ilustrasi diatas menggambarkan setiap user harus memiliki account yang berbeda-beda saat login di setiap aplikasi, hal ini tentunya beresiko lupa account login karena user wajib mengingat masing-masing username dan password untuk dapat login ke aplikasi.

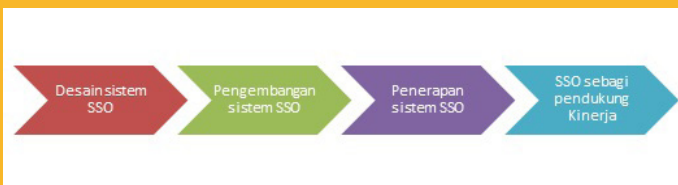
Dengan sistem SSO maka dapat dilakukan penyederhanaan sekali login (single-sign-on) dengan melakukan autentikasi pada database yang menjadi dasar untuk seluruh account tersebut. Sistem yang akan dikembangkan akan melakukan autentikasi pada database active



Gambar 3. Desain Prototype Portal SSO yang dapat diakses Melalui Alamat 10.40.1.50

Tahun anggaran 2015 ini telah dikembangkan desain system SSO yang telah menghasilkan ujicoba prototype cactive portal SSO, yang mana melalui kegiatan 2016 akan dilakukan implementasi desain tersebut dengan system SSO yang sudah direncanakan.

Berikut ini adalah roadmap pengembangan sistem SSO yang masuk dalam kategori kegiatan sistem kolaborasi:



Gambar 4. Roadmap system SSO 2015-2019

Roadmap ini adalah merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Pengembangan Infrastruktur subbidang Sistem Jaringan Komputer 2015-2019.

Dengan interkoneksi yang semakin massif, maka beberapa Perencanaan hingga 2019 adalah :

- Penataan dan peningkatan infrastruktur FO dan distribusi, baik backbone maupun antar gedung/lantai;
- High Availability (HA), yaitu: sebuah implementasi yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan peralatan utama sistem jaringan komputer agar

layanan komunikasi data tidak terganggu. Implementasi ini menyediakan 2 alat yang sama dan bekerja saling melengkapi (load balancing);

- Advanced monitoring system GSLB untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran data antara data center/interkoneksi (DC) dan disaster recovery center (DRC) atau biasa disebut juga dengan GSLB (Global Server Load Balancer).

Jaringan Pertanian atau Pertanian Network yang begitu massif perlu dilengkapi dan dimanfaatkan untuk sistem komunikasi yang bersifat interaktif, dalam hal ini adalah pengembangan sistem komunikasi yang berbasis video conference.

Era informasi saat ini telah sampai kepada generasi baru komunikasi dimana manusia dapat saling berkomunikasi dimana saja dan kapan saja. Video Conference (Vicon) adalah suatu sistem yang menyediakan fasilitas audio-visual untuk mempertemukan dua pihak atau lebih dengan menggunakan jaringan internet broadband. Dengan fasilitas audio-visual secara real time membuat komunikasi terasa nyata dan interaktif, sehingga pengguna seakan-akan berhadapan langsung dengan peserta lain meskipun berada di kota/negara lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat tersebut dan pengimplementasi e-Government dilingkungan Kementerian Pertanian, serta pemanfaatan seoptimal mungkin sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, maka diperlukan penggunaan video conference sebagai alat komunikasi baru untuk menunjang kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan informasi baik berupa data maupun hal yang terkait koordinasi antar institusi di lingkup Kementerian Pertanian.

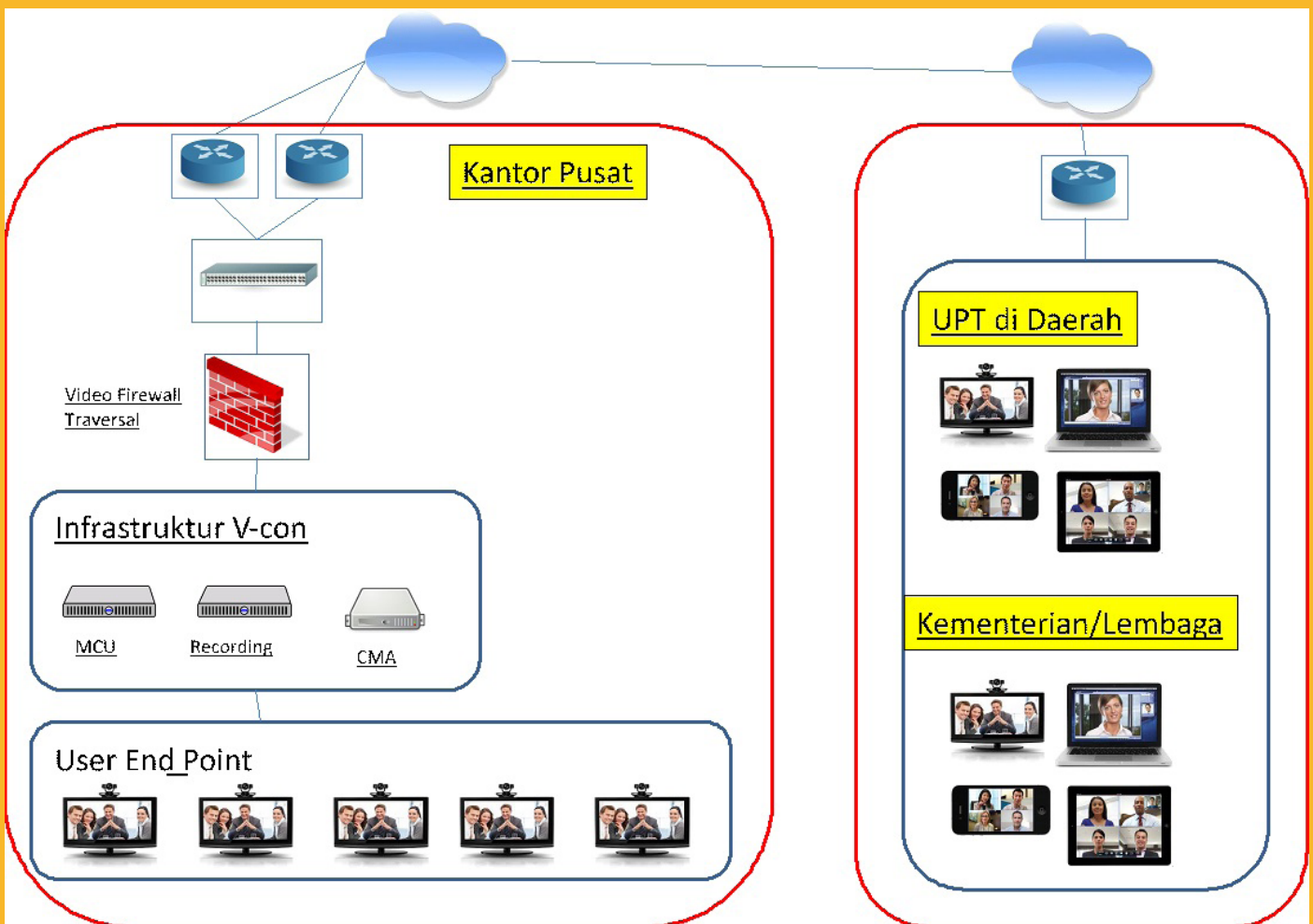
Sistem video conference ini dapat diimplementasikan memerlukan 2 (dua) syarat utama yaitu :

1. Perangkat Infrastruktur Sistem video conference

Perangkat ini diperlukan sebagai pusat pengolahan (logic processing), keamanan (security) dan pengoperasian (administrator), segala fitur yang diperlukan untuk melakukan panggilan video maupun berbagi konten dilakukan oleh perangkat tersebut, perangkat tersebut nantinya akan diletakkan di fasilitas data center yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.

2. Perangkat Endpoint (User)

Perangkat ini diperlukan sebagai media penghubung tatap muka dimana media tersebut harus memiliki sebuah camera untuk melakukan panggilan video/ panggilan tatap muka, perangkat ini terdapat di masing-masing user yang ingin melakukan panggilan video dimana setiap user akan diberikan sebuah account untuk dapat mengikuti ke dalam ruang rapat virtual.



Gambar 5. Rencana Rancangan Jaringan v-Con Kementan

Pada sistem tersebut setiap user endpoint/ pengguna dilengkapi oleh perangkat khusus untuk video conference hal ini bertujuan agar kualitas panggilan video dapat maksimal karena perangkat tersebut dilengkapi oleh perangkat camera beresolusi tinggi, selain itu perangkat tersebut dapat melakukan kompresi data (menghemat bandwidth)

dengan begitu penggunaan bandwidth dapat dioptimalkan dengan perangkat tersebut. Pengguna selain dapat melakukan panggilan video dapat melakukan sharing content (berbagi presentasi) bisa berupa dokumen presentasi, dokumen word dan excel. Pengguna dimungkinkan untuk melakukan editing dokumen yang di sharing oleh pengguna.

Dari seluruh penjelasan diatas, semua peralatan yang ada harus memiliki interoperabilitas yang tinggi, kemudian dengan mudah mampu “beradaptasi” dengan peralatan yang sudah ada serta sesuai dengan arsitektur jaringan Pertanian Network yang telah beroperasi selama ini (stabil).

Melalui kegiatan ini, maka dapat disimpulkan beberapa manfaat dari Peningkatan Infrastruktur TIK Kementerian Pertanian ini, khususnya bagi **user di lingkup kantor pusat Kementerian Pertanian** maupun **masyarakat**, yaitu:

- Peningkatan performa dan kapasitas data center Kementerian;
- Stabilitas koneksi jaringan dan layanan data;
- Menyediakan layanan transaksi 24 jam, khususnya pada layanan kolaborasi, perizinan, pengadaan elektronik dan sistem informasi pertanian strategis lainnya;
- Peningkatan keamanan akses internet;
- Khususnya bagi masyarakat adalah: dapat mengakses data dan informasi pertanian secara cepat dan mudah.



(Hani Hanifah R, S.Kom)



REDAKSI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Tim Redaksi

Pengarah :

Kapusdatin

Penasehat :

Kepala Bagian Umum

Penanggung Jawab :

Kasubag Pelayanan dan Publikasi Data

Redaktur :

Dhanang Susatyo, SE

Editor :

Hani Hanifah R, S. Kom

Dra. P. Hanny Muliandy, MM

Budi Setiono

Agus Sumantri, S.Sos

Fotografer :

Sri Lestari, ST

Iswadi

Desain Grafis :

Cahyani Wartianingsih, S.Kom

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Sekretaris :

Eli David, S.Sos, MM

Hotlanis Mangatur Sibarani, S.Kom

Musdino

Suparmi

Alamat Redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV Pasar Minggu - Jakarta 12550

Telp : 021- 7805305, 7816384, Fax : 021 - 7822638, e-mail : newsletter@pertanian.go.id